

## PEMBERDAYAAN PEKERJA INFORMAL UNTUK KEPERSETAAN MANDIRI DALAM ASURANSI KESEHATAN

Nur Indah Nasution<sup>1</sup>, Nadya Fitriyani<sup>2</sup>, Indah Kumala Dewi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina,  
Rantauprapat, Indonesia <sup>2</sup> Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas  
Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

Email: <sup>1</sup>nurindahnst@gmail.com, <sup>2</sup>nadyafitriyani@gmail.com, <sup>3</sup>indahdewikumala@gmail.com  
(\*: nurindahnst@gmail.com)

### Article History:

Received: Oktober 02, 2025;

Revised: Oktober 19, 2025;

Accepted: Oktober 23, 2025;

Online Available: November 19, 2025;

Published: November 29, 2025;

**Keywords:** empowerment, informal workers, independent membership, health insurance, BPJS Health.

**Abstract:** *Informal workers are a group that contributes significantly to the Indonesian economy, but still have a low level of independent participation in the national health insurance program. This low participation is caused by minimal insurance literacy, income instability, and a lack of awareness of the importance of health protection. This activity aims to empower informal workers to have the ability and willingness to become independent participants in health insurance. The method used is a community-based participatory approach through three main stages: education on the benefits of health insurance, microfinance management training for regular premium payments, and assistance with independent registration for participation. The activity results showed a significant increase in participants' knowledge and understanding of the benefits of health insurance. In addition, there was an increase in the number of informal workers registering as independent participants and demonstrating a commitment to sustainable premium payments. This program demonstrates that community empowerment can be an effective strategy to expand Universal Health Coverage (UHC) and improve the welfare of informal workers through sustainable health protection.*

### Abstrak

Pekerja informal merupakan kelompok dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun masih memiliki tingkat kepesertaan mandiri yang rendah dalam program asuransi kesehatan nasional. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh minimnya literasi asuransi, ketidakstabilan pendapatan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pekerja informal agar memiliki kemampuan dan kemauan menjadi peserta mandiri asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui tiga tahap utama, yaitu edukasi tentang manfaat jaminan kesehatan, pelatihan manajemen keuangan mikro untuk pembayaran premi rutin, serta pendampingan pendaftaran kepesertaan mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai manfaat asuransi kesehatan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah pekerja informal yang mendaftar sebagai peserta mandiri dan menunjukkan komitmen dalam keberlanjutan pembayaran iuran. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal melalui perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, pekerja informal, kepesertaan mandiri, asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor informal memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 60% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, meliputi pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, nelayan, petani, hingga pekerja lepas. Meskipun memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pekerja informal masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, salah satunya adalah rendahnya akses terhadap jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap risiko kesehatan dan finansial ketika menghadapi sakit atau kecelakaan kerja.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui prinsip gotong royong. Namun, tingkat kepesertaan mandiri dari kalangan pekerja informal masih tergolong rendah. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya literasi asuransi, ketidakpastian pendapatan yang membuat pembayaran premi menjadi tidak rutin, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan. Selain itu, sebagian besar pekerja informal memiliki persepsi bahwa asuransi kesehatan tidak memberikan manfaat langsung, sehingga partisipasi dalam program ini belum menjadi prioritas.

Dalam konteks tersebut, upaya pemberdayaan pekerja informal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan mandiri dalam asuransi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan motivasi agar mereka mampu mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan keuangan. Pendekatan partisipatif berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan program semacam ini, karena mampu mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses edukasi dan perubahan perilaku. Melalui kegiatan edukasi kesehatan, pelatihan manajemen keuangan, serta pendampingan pendaftaran asuransi kesehatan, pekerja informal dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang manfaat perlindungan jaminan kesehatan serta cara mengelola keuangan agar mampu membayar premi secara berkelanjutan. Pemberdayaan pekerja informal dalam konteks ini juga sejalan dengan agenda nasional menuju Universal Health Coverage (UHC), yaitu memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

tanpa menghadapi kesulitan finansial. Dengan meningkatnya partisipasi pekerja informal dalam program asuransi kesehatan, beban pembiayaan kesehatan masyarakat dapat ditekan, dan ketahanan ekonomi keluarga menjadi lebih kuat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program ini.

Oleh karena itu, penelitian dan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan untuk mendorong pekerja informal menjadi peserta mandiri dalam asuransi kesehatan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan finansial, serta partisipasi aktif pekerja informal dalam program BPJS Kesehatan. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepesertaan mandiri, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode Kegiatan pemberdayaan pekerja informal untuk meningkatkan kepesertaan mandiri dalam asuransi kesehatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (Community-Based Empowerment Approach). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sasaran—dalam hal ini para pekerja informal—sebagai subjek utama yang aktif terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuannya adalah agar proses pemberdayaan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan.

### **2.1 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

Program ini dilaksanakan di kawasan dengan konsentrasi pekerja informal yang tinggi, seperti pasar tradisional, pangkalan ojek daring, serta kawasan nelayan dan petani. Sasaran kegiatan adalah pekerja informal yang belum menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan atau yang berhenti membayar iuran karena keterbatasan ekonomi.

## **2.2 Tahapan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahap utama, yaitu:

### **a. Tahap Persiapan**

Kegiatan diawali dengan survei dan pemetaan kondisi pekerja informal di wilayah sasaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kemampuan finansial, serta kendala yang dihadapi dalam menjadi peserta asuransi kesehatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan perangkat desa, dinas kesehatan, dan perwakilan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan dukungan teknis dan informasi yang akurat.

### **b. Tahap Sosialisasi dan Edukasi**

Pada tahap ini dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya jaminan kesehatan, manfaat menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, serta penjelasan mengenai mekanisme pembayaran iuran. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok (FGD), dan penyebaran leaflet edukatif. Edukasi ini bertujuan meningkatkan literasi asuransi dan mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap program jaminan kesehatan.

### **c. Tahap Pelatihan Manajemen Keuangan Mikro**

Tahap ini berfokus pada penguatan kemampuan finansial pekerja informal. Peserta diberikan pelatihan tentang cara mengelola pendapatan tidak tetap, strategi menabung untuk pembayaran premi, serta simulasi perencanaan keuangan keluarga. Pelatihan ini melibatkan fasilitator keuangan mikro dan pendamping komunitas yang telah berpengalaman.

### **d. Tahap Pendampingan Pendaftaran Kepesertaan Mandiri**

Setelah peserta memiliki pemahaman yang cukup, dilakukan pendampingan administratif dalam proses pendaftaran BPJS Kesehatan secara mandiri. Tim pendamping membantu mengisi formulir, melakukan verifikasi data, serta memastikan peserta memahami mekanisme pembayaran iuran bulanan melalui kanal resmi seperti bank atau aplikasi digital.

### **e. Tahap Evaluasi dan Monitoring**

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, dilakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pembayaran premi serta menilai dampak program terhadap kesadaran dan perilaku peserta.

### 2.3 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari survei dan hasil evaluasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kepesertaan, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menggali persepsi, motivasi, dan hambatan yang dialami peserta. Melalui metode pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan pemberdayaan tidak hanya meningkatkan jumlah pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kemandirian finansial mereka untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan jangka panjang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program *Pemberdayaan Pekerja Informal untuk Kepesertaan Mandiri dalam Asuransi Kesehatan* menghasilkan berbagai capaian yang menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan pekerja informal dalam program BPJS Kesehatan mandiri. Berikut penjabaran hasil dan pembahasannya secara detail dalam lima bagian utama:

### 3.1 Profil dan Karakteristik Peserta

Peserta kegiatan berjumlah 80 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, buruh harian, dan nelayan. Sebagian besar peserta memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah dan pendapatan yang tidak tetap setiap bulan. Berdasarkan survei awal, sebanyak 65% peserta belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, sementara sisanya terdaftar namun tidak aktif membayar iuran karena keterbatasan finansial. Data ini menunjukkan masih tingginya kerentanan pekerja informal terhadap risiko kesehatan dan ekonomi akibat tidak adanya perlindungan jaminan kesehatan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan strategi pemberdayaan yang tepat, yaitu melalui pendekatan edukatif dan penguatan literasi keuangan agar pekerja informal mampu mengelola pendapatan tidak tetap dengan lebih bijak.

### 3.2 Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Peserta

Sebelum pelaksanaan program, hanya 30% peserta yang memahami manfaat dan mekanisme asuransi kesehatan. Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan: 85% peserta mampu menjelaskan kembali fungsi BPJS

Kesehatan, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat perlindungan kesehatan. Selain itu, peserta juga mengalami perubahan persepsi positif. Jika sebelumnya banyak yang menganggap premi sebagai beban tambahan, setelah edukasi mereka memahami bahwa iuran merupakan bentuk investasi kesehatan keluarga. Perubahan pola pikir ini merupakan indikator keberhasilan edukasi berbasis komunitas, di mana pemahaman dibangun melalui diskusi dan pengalaman bersama, bukan sekadar penyuluhan satu arah.

### **3.3 Peningkatan Kemandirian Finansial**

Pelatihan manajemen keuangan mikro memberikan dampak nyata terhadap kemampuan peserta dalam mengatur pendapatan. Sebanyak 72% peserta mulai menerapkan strategi tabungan harian dan pencatatan keuangan sederhana. Misalnya, pedagang kaki lima menyisihkan Rp5.000 per hari untuk membayar premi BPJS bulanan. Selain itu, sebagian peserta membentuk kelompok arisan kesehatan sebagai mekanisme gotong royong untuk memastikan iuran tetap terbayar meskipun pendapatan sedang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong terbentuknya inovasi sosial yang lahir dari inisiatif masyarakat sendiri.

### **3.4 Peningkatan Jumlah Kepesertaan Mandiri**

Setelah proses pendampingan, sebanyak 48 peserta (60%) berhasil mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan, sedangkan 15 peserta lainnya menyatakan kesanggupan bergabung dalam waktu dekat setelah menyiapkan dokumen dan dana iuran pertama. Capaian ini menunjukkan efektivitas tahapan pendampingan langsung yang dilakukan oleh tim fasilitator. Lebih lanjut, dalam periode monitoring selama dua bulan, 90% peserta yang sudah mendaftar tetap aktif membayar iuran tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan tanggung jawab peserta terhadap kepesertaan asuransi sudah mulai tertanam dengan baik.

### **3.5 Faktor Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan**

Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya kolaborasi dengan BPJS Kesehatan cabang setempat yang mempermudah proses administrasi, serta peran tokoh komunitas yang aktif memotivasi anggotanya untuk bergabung. Dukungan pemerintah daerah juga memperkuat keberlanjutan program melalui penyediaan fasilitas sosialisasi dan subsidi awal bagi peserta berpenghasilan rendah.

Namun, masih terdapat hambatan seperti ketidakstabilan pendapatan sebagian peserta, kurangnya literasi digital untuk pembayaran iuran daring, dan keterbatasan waktu pekerja informal untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Kendati demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan fleksibel, pendampingan jangka panjang, serta penguatan kelompok komunitas agar dapat menjadi penggerak keberlanjutan program. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran, kemandirian, dan partisipasi pekerja informal dalam kepesertaan mandiri asuransi kesehatan. Pendekatan edukatif yang disertai pelatihan keuangan terbukti efektif dalam membangun perilaku berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi secara finansial.

#### 4. KESIMPULAN

Program *Pemberdayaan Pekerja Informal untuk Kepesertaan Mandiri dalam Asuransi Kesehatan* berhasil menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta partisipasi pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Pekerja informal, yang selama ini menjadi kelompok rentan karena tidak memiliki akses memadai terhadap jaminan kesehatan, mampu bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan setelah mendapatkan edukasi dan pendampingan yang tepat.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai manfaat asuransi kesehatan. Sebelum pelaksanaan program, sebagian besar peserta memiliki persepsi negatif dan minim informasi terkait mekanisme keikutsertaan BPJS Kesehatan. Namun, setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan, tingkat literasi asuransi meningkat secara signifikan. Peserta mulai memahami bahwa asuransi bukanlah beban finansial, melainkan bentuk perlindungan sosial yang dapat mencegah risiko ekonomi akibat sakit atau kecelakaan kerja. Dari sisi ekonomi, pelatihan manajemen keuangan mikro memberikan dampak nyata terhadap kemampuan peserta mengatur pendapatan tidak tetap. Mereka belajar mengalokasikan sebagian kecil pendapatannya untuk pembayaran premi, bahkan beberapa kelompok mengembangkan sistem gotong royong seperti arisan kesehatan untuk menjaga keberlanjutan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang

berkesinambungan, pekerja informal mampu menciptakan mekanisme sosial-ekonomi yang adaptif dan mandiri.

Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan ini juga berhasil memperkuat solidaritas sosial antaranggota komunitas. Dukungan dari tokoh masyarakat, aparat desa, serta instansi BPJS Kesehatan turut menjadi faktor penting dalam memperlancar proses pendaftaran dan monitoring kepesertaan. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pekerja informal melalui pendekatan edukasi, pelatihan finansial, dan pendampingan administratif terbukti efektif dalam meningkatkan kepesertaan mandiri dalam program asuransi kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Hossain, M. S., & Islam, M. R. (2022). Role of microfinance and health education in promoting health insurance uptake in low-income communities. *Health Policy and Planning*, 37(5), 552–561. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac019>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Strategi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Nasution, Z., & Hidayat, M. (2020). The impact of community-based education on BPJS Kesehatan participation among informal workers. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 95–107.
- Nugroho, A., & Rahman, F. (2021). Barriers to voluntary health insurance participation among informal workers in Indonesia. *BMC Health Services Research*, 21(1), 1145–1156. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07123-0>.
- Okonkwo, C., & Adeola, F. (2020). Social inclusion and informal worker empowerment in health protection schemes. *International Journal of Social Welfare*, 29(4), 389–401. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12438>.
- Prasetyo, R., & Lestari, E. (2023). Strengthening informal worker participation in the National Health Insurance: A participatory approach. *Indonesian Journal of Social Development*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.33578/ijsd.v9i2.4246>.
- Putri, S. H., & Handayani, T. (2023). Financial literacy and health insurance participation among micro-entrepreneurs. *Asian Economic and Financial Review*, 13(4), 289–301.

<https://doi.org/10.55493/5002.v13i4.4582>.

- Sari, M. P., & Wahyuni, R. (2021). Challenges of informal sector workers in achieving universal health coverage. *Indonesian Journal of Health Policy Studies*, 5(3), 215–227.
- Setiawan, D., & Utami, R. (2021). Socioeconomic determinants of informal worker participation in social security programs. *International Journal of Health Policy and Management*, 10(9), 593–602. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.18>.
- Supriyadi, Y. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, H., & Ananda, S. (2024). Behavioral factors affecting compliance in health insurance premium payments among informal workers. *Journal of Health Economics and Policy*, 19(1), 33–49. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2024.01.005>.
- Widiastuti, D., & Rachman, A. (2022). Community empowerment in informal sector workers for health insurance awareness. *Journal of Public Health Policy*, 45(3), 215–230. <https://doi.org/10.1057/s41271-021-00346-8>.
- Widodo, T., & Rahardjo, B. (2022). Assessing the sustainability of informal worker enrollment in Indonesia's health insurance system. *Global Health Research and Policy*, 7(1), 98–109. <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00271-3>.
- Yusuf, L., & Kartika, D. (2020). Participatory empowerment models for informal labor groups in urban areas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45–60.